



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 4 No. 2 Tahun 2021

Doi : 10.21043/politea.v4i2.11760

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

---

## **Islamisme Turki: Kaum Tarekat dan Kebangkitan Islam-Politik Republik Turki**

**Fahmi Rizal MH**

*UIN Sunan Ampel Surabaya*

*Fahmirizalmh@gmail.com*

### **Abstract**

After announcing as an independent state, the Republic of Turkey adopted the secularism system as the principle of the new Turkish state. In simple terms, the Turkish state released the Islamic religious identity that had been attached and identical to the Ottoman Empire which had lasted for 700 years. In implementing the secularism policy, the Turkish government faces challenges from Muslims / Islamists who want to replace the secularist order by carrying out rebellions or participating in elections with the aim of restoring sharia or wanting to establish an Islamic state / caliphate again. This study aims to track the development of the tarekat and its members who played an active role in the rise of Political Islam in Turkey. By using a historical research approach and using qualitative research methods. This study found several factors that influenced the rise of Turkish Islamism. One of them is the vital role of the tarekat centered on the Iskenderpasa Mosque, which is led by Sheikh Mehmet Zahid Kotku. In their efforts to fight secularism, the tarekat mobilized their members to take an active part in the elections in Turkey. Many of the tarekat members, especially the Naqshbandiyah who occupy important positions in Turkey, such as Turgut Ozal, the former President of Turkey, Erbakan, the former Prime Minister of Turkey, one of the important actors in the rise of the Islamic Party, and the current Turkish president Recep Tayyip Erdogan, are also members of the congregation of the Naqshbandiyah Order.

Keywords: Islamism, Turkey, Secularism, Tariqah, political Islam

### **Abstrak**

Pasca mengumumkan sebagai negara yang merdeka, Republik Turki mengadopsi sistem sekularisme sebagai prinsip negara Turki yang baru. Secara sederhana negara Turki melepaskan identitas agama Islam yang sudah melekat dan identik pada kerajaan Turki Usmani yang sudah bertahan selama 700 tahun lamanya. Dalam melaksanakan kebijakan sekularisme tersebut, pemerintahan Turki mendapatkan tantangan dari umat Islam / kaum Islamis yang ingin menggantikan tatanan sekularisme tersebut dengan melakukan pemberontakan ataupun ikut berpartisipasi dalam pemilu yang mempunyai tujuan ingin merestorasi syariah ataupun ingin mendirikan negara Islam/ khilafah kembali. Penelitian ini bertujuan untuk melacak perkembangan dari tarekat dan anggotanya yang berperan aktif dalam kebangkitan Islam Politik di Turki. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sejarah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kebangkitan Islamisme Turki. Salah satunya adalah peran vital dari kaum tarekat yang berpusat di Masjid Iskenderpasa, yang dipimpin oleh Syekh Mehmet Zahid Kotku. Dalam usahanya untuk melawan sekularisme kaum tarekat memobilisasi para anggota mereka untuk ikut aktif dalam pemilu di Turki. Banyak dari anggota tarekat, terutama Naqsyabandiyah yang menduduki posisi penting di Turki, seperti Turgut Ozal mantan Presiden Turki, Erbakan mantan Perdana Menteri Turki salah satu aktor penting dalam kebangkitan Partai Islam, dan presiden Turki sekarang Recep Tayyip Erdogan, juga merupakan anggota jamaah dari tarekat Naqsyabandiyah.

Kata Kunci: Islamisme, Turki, Sekularisme, Tarekat, Politik Islam

## Pendahuluan (Introduction)

Salah satu aliran atau ajaran yang telah ada dalam ajaran Islam adalah tasawuf atau sufisme. Ajaran tasawuf yang kemunculannya pada abad ke 7 masehi, telah mewarnai peradaban Islam yang telah berkembang selama lima belas abad. Tujuan dari ajaran ini adalah untuk menyucikan jiwa atau mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ritual seperti berdzikir, sholat, dan memperbanyak ibadah lainnya. Pada abad ke 12 Masehi, sufisme semakin kompleks dengan terbentuknya institusionalisasi ajaran dengan munculnya persaudaraan sufi atau *thariqah* —tarekat, *tarikah*.

Dalam suatu tarekat, biasanya akan dipimpin oleh seorang guru—*syekh*, *pir*,— yang dihormati, dan diakui keilmuannya. Pengikutnya atau *murid*, akan setia kepada apa yang diajarkan oleh seorang syekh. Nama dari suatu tarekat biasanya disandarkan kepada pendiri dari tarekat tersebut, Tarekat Qadiriyyah disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jaelani (w. 1166), atau juga disandarkan pada nama daerah dimana pendiri tarekat itu berasal seperti tarekat Naqshabandiyah disandarkan kepada Muhammad Bahauddin an-Naqsyabandi (w.1389) yang berasal dari Bukhara, Uzbekistan.

Salah satu ajaran atau doktrin tasawuf adalah *zuhud*, atau menjaga diri dari hawa nafsu, kekayaan, kenikmatan, dan harta benda lainnya (Zaid, 2017). Konsep *zuhud* yang diidentikkan dengan aksetisme seperti ini pada gilirannya melahirkan konsep lain, yaitu, *faqr* (kefakiran), dalam makna praktis yang khas pula. Bahwa untuk bisa mendekat atau bertemu dengan Allah swt., kita harus hidup seperti orang fakir (Bagir, 2019)

Dalam perjalanannya dalam sejarah Islam, dinamika dan ajaran sufisme telah berkembang sesuai dengan kondisi sosial yang dialami. Kerap kali para sufisme melampaui doktrin-doktrin yang sudah diajarkan oleh para *syekh*. Misalnya para sufisme ikut berjuang merebut kemerdekaan, misalnya tarekat Sanusiyah yang melawan ekspansi Prancis di Aljazair.

Turki pasca memproklamkan kemerdekaannya pada 29 Oktober 1923 menerapkan kebijakan sekularisme, dan menerapkan kebijakan yang merugikan anggota tarekat seperti menutup masjid, pondok sufisme dan melarang untuk beraktivitas. Tentunya hal ini mendapat respon dari para kaum tarekat, dengan melakukan berbagai perlawanan untuk mendobrak tatanan sekularisme Turki.

Bentuk-bentuk perlawanan kaum tarekat di Turki beragam; ada yang melalui mobilisasi massa dan melakukan perlawanan seperti yang dilakukan oleh Syekh Nursi pada 1925 (Yavuz, 2003). Lalu pada masa-masa selanjutnya ketika demokrasi Turki sudah terbuka lebar, para anggota tarekat ikut berpartisipasi untuk ikut dalam partai-partai politik Islam. Sehingga beberapa anggota tarekat hadir di pemerintahan Republik Turki, seperti presiden Turki sekarang, Recep Tayyip Erdogan.

Berdasarkan paparan sejarah diatas, menarik untuk menulis tentang peran tarekat dalam partai-partai politik Islam di Turki pasca diberlakukannya kebijakan sekularisme. Lalu bagaimanakah perkembangan dan peran tarekat dalam membangkitkan politik Turki?. Faktanya tarekat merupakan salah satu dari bangkitnya Islam politik Turki. Jaringan, aktivitas, kegiatan tarekat sangat aktif dalam sejarah, baik Turki modern dan Turki Usmani.

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode sejarah, menurut Gilbert Garraghan sebagaimana dikutip oleh Dudung Abdurrahman, Penelitian Sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya dengan kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan (Abdurrahman, 1999)

Salah satu penelitian tentang Islamisme Turki yang ditulis Ahmad Junaidi (2016) tentang Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. Penulis menyimpulkan bahwa Erdogan mampu membangkitkan kembali Turki dari the Sick Man in Europe, menjadi negara yang sehat dan tumbuh berkembang, dengan menyandarkan bahwa Erdogan mempunyai keyakinan bahwa "Islam adalah solusi", dan Erdogan sendiri mempunyai background lingkungan keislaman. Jika tulisannya melihat Islamisme dalam konteks modern atau pasca Recep Tayyib Erdogan, maka penelitian ini akan melihat Islamisme Turki pada masa kemunculannya awal pasca negara Turki modern didirikan (Junaidi, 2016).

## **Pembahasan (discussion)**

### *Sejarah Tarekat di Negara Turki*

Dua tarekat penting, Naksibandiyah dan Halvetiye, yang berasal dari Asia Tengah, dan memiliki kecenderungan Sunni, ditambahkan sebagai tarekat yang datang dari luar Aantolia. Memainkan peran penting dalam bidang politik, sosial dan agama pada periode *beylik* dan turki Usmani, keduanya terdapat di Anatolia dan Balkan, dan bertahan hingga sekarang.

Di samping tarekat-tarekat yang datang dari luar, tarekat baru berkembang di Anatolia pada akhir abad ketiga belas. Antara lain salah satu yang paling menonjol seperti yang sudah di kenal pada saat itu, Maulawiyah, atau Celaliye. Tarekat ini mulai menyebar dengan cepat di Beyliks Turkoman di barat Anatolia setelah kematian Maulana Jalaludin Rumi, upaya yang cukup besar dilakukan oleh putra Sultan Veled dan cucunya Ulu Arif Celebi atas menyebarnya tarekat ini pada abad ke empat belas. Tarekat perkotaan ini, yang mendapat pengaruh di Kerajaan Usmani setelah pertengahan abad kelima belas, mengalami masa yang paling sukses dalam sejarahnya pada abad ketujuh belas. (Ocak, 2009)

Tarekat lokal lain yang setidaknya sama-pentingnya dalam sejarah Anatolia sebagaimana Maulawiyah dan bahkan tersebar lebih luas di daerah pedesaan adalah Bektashi, yang berkembang di lingkungan yang sama sekali berbeda dengan basis sosial yang sama sekali berbeda, dan memiliki pandangan sufi yang berbeda. Tarekat ini tidak terkait langsung dengan pandangan *syekh* Haci Bektas Veli yang dari namanya diambil. Awal dari periode ketika secara resmi didirikan pada abad keenam belas, tarekat ini adalah salah satu tarekat yang paling berpengaruh pada masa Turki Usmani di daerah pedesaan dan bahkan menyentuh sektor perkotaan Anatolia dan Balkan (Ocak, 2009).

Salah satu tarekat yang mempunyai peran besar sejak era Turki Usmani hingga Republik Turki modern adalah tarekat Naqsyabadiyah. Naqsyabadiyah telah berhasil menarik beberapa sultan dan para pejabat Turki Usmani sehingga mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan sosial keagamaan Turki Usmani. Dalam konteks modern, tarekat ini menjadi inspirasi bagi beberapa kalangan sebagai pembentuk jaringan sosial untuk melawan sekularisme Turki modern dengan

berbagai jalan seperti mobilisasi masa dan menjadi jalan untuk mendirikan partai politik hingga masuk ke pemerintahan Turki.

Naqsyabadiyah, yang telah menjalin hubungan istimewa dengan dinasti Timuriyah, datang ke Anatolia bersamaan dengan pasukan Timur. Ortodoksi mereka tampaknya telah membuat Utsmani terkesan, yang segera menjalin hubungan dengan mereka (Mardin, 1991).

Menantu Bayezid I, seorang mistikus terkenal Emir Sultan (1368-1429), adalah putra Seyyid Emir Kulal, seorang murid Bahauddin Naqsyab. Sultan Mehmed II (memerintah 1451-1481) mengundang sejumlah tokoh Naqsyabadiyah terkemuka ke Istanbul. Mollah İlahî (w. 1490-1491) seorang penduduk kota Simav, melakukan perjalanan ke Asia tengah dan memilih untuk bergabung dengan tarekat Naqsyabadiyah karena dorongan dia ingin membangun reputasi kota ini. Setelah kembalinya ke Kerajaan Usmani, dia mendirikan *tekke* (pondok) Naqsyabadiyah pertama yang penting, pertama di kota asalnya dan kemudian di Istanbul. Naqsyabadiyah kemudian memperoleh posisi sentral dalam kehidupan keagamaan Turki, yang mereka pertahankan meskipun ada persaingan dengan tarekat Maulawiyah.

Salah satu cabang dari tarekat Naksabandi yang mempunyai pengaruh besar adalah Naqsyabadiyah cabang Khalidi. Nama ini disandarkan kepada pendirinya yang dikenal sebagai Mevlana Halid Baghdadi (1776-1827). Lahir di distrik Shahrizur yang sekarang termasuk daerah Iraq. Dia bertemu dengan seorang letnan (*khalifah*) yang memuji Syaikh Abdullah Dihlavi, yang menyakinkannya untuk belajar dengan Dihlavi di Delhi. Dia meninggalkan India pada 1810-11, kembali ke Suleymaniyye, bermusuhan dengan seorang Syekh dari tarekat Kadiri, pergi ke Baghdad dan membangun pondok Khalidi pertama di kota itu pada 1813. Dari sana, tarekatnya menyebar ke Suleymaniyye, lalu ke Jerussalem, Aleppo, Basram Kirkuk, Erbil, Diyarbakir, Cizre, Madrin, Urfa, Gaziantep dan Konya (Mardin, 1991).

Tujuan utama Syekh Khalid adalah untuk "mempromosikan kembali moral dan spiritualitas komunitas bersama-sama disluruh kekhilafahan Usmaniyah. Untuk memperkuat kohesi terhadap serangan eksternal," dan dia dengan hati-hati mengejar kebijakan untuk menembus negara dengan merekrut ulama dan beberapa petinggi birokrat. Namun sejak Sultan Mahmud II (memerintah 1808-1839) selalu curiga terhadap para pemimpin karismatik dan para loyalis alternatif yang ada dalam negara, ia kemudian melarang tarekat Naksibendi-Khalidi di Istanbul dan mengasingkan para syekhnya.

Di bawah sultan Abdülmecid (memerintah 1839-1861) pengusiran dan penganayaan terhadap Naqsyabadiyah-Khalidi dihentikan, dan beberapa murid Naqsyabadiyah diangkat ke posisi otoritas. Selama pemerintahan Abdülmecid, Abdülaziz (memerintah 1861-1876), dan Abdülhamid II (memerintah 1876-1909), Naksibendi memperluas pengaruhnya dan menjadi salah satu kekuatan mediasi terpenting antara penguasa dan memerintah (Yavuz, 2003)

Naqsyabadiyah-Khalidi juga mendirikan satu pondokan di wilayah Hizan-Van di Anatolia Timur, yang akan menjadi sumber dari gerakan selanjutnya, Nur, yang akan kita bahas sebentar lagi. Pengetahuan Sultan Mahmud II tentang peran transformasional Halidis sebagai agitator daripada pemandu agama dibenarkan dua dekade setelah kematiannya ketika gerakan pertama melawan kebijakan reformis Tanzimat dipimpin oleh seorang Naqsyabadiyah, Syaikh Ahmed dari Süleymaniye (1859). Sejarawan Turki, Cevdet Pasha, menyebutkan bagaimana para

konspirator dalam peristiwa ini tidak dapat dihukum mati karena kesenjangan dalam KUHP, dan harus dipenjarakan.

Pemimpin Khalidi abad kesembilan belas yang paling penting di Turki adalah Ziyaeddin Gümüşhanevi (w. 1893). Agaknya waspada terhadap pengalaman Syaikh Ahmed, gerakannya diam-diam dan bertahap. Dia mendirikan pusatnya di sebuah masjid yang hancur yang dekat dengan pusat pemerintahan. Terkesan dengan pendirian Bank Utsmaniyah, ia mendirikan lembaga amal untuk pondoknya (*dergâh*). Modal awal didapatkan dari sumbangan oleh murid-muridnya yang kaya. Itu akan digunakan untuk pinjaman kepada usaha kecil dan untuk mendukung orang miskin (Mardin, 1991).

Kelak dari anggota Gümüşhanevi ini akan melahirkan orang-orang dengan spirit keislaman yang ingin melawan sekularisme Turki modern dengan berbagai cara seperti mobilisasi masa seperti yang dilakukan oleh Syekh Said Nursi ataupun masuk kedalam pemerintahan negara seperti yang diperintahkan oleh Syekh Mehmed Zahit Kotku kepada murid-muridnya pada tahun 1970-an.

Kebangkitan modern Naqsyabadiyah adalah pencarian identitas "asli" sebagai perjuangan untuk mengontrol sumber daya. Sedangkan revivalisme abad kesembilan belas berfokus pada transformasi politik, gerakan Islam modern yang mencari kekuatan sosial dan ekonomi yang terkadang dapat digunakan untuk membentuk kebijakan negara. Selama Perang Kemerdekaan, Naksibendi memainkan peran penting dalam memobilisasi penduduk. Sebuah *tekke* (pondok) Ozbek di Uskudar, misalnya, memberikan perlindungan bagi pejabat tinggi Turki yang melarikan diri dari pendudukan Angkatan Sekutu. Ismet Inonu, wakil Mustafa Kemal, tinggal di pondok ini, dan menawarkan dukungan logistik kepada banyar tokoh nasionalis lainnya. Beberapa orang terkemuka lainnya para pemimpin Naksibendi aktif mengambil bagian dalam perang kemerdekaan. Sebagai contoh, Hasan Feyzi Effendi dari Erzincan memimpin mobilisasi melawan pendudukan pasukan di Erzincan dan Bayburt. (Yavuz, 2003).

### *Negara Republik Turki Baru*

Setelah mendeklarasikan kemerdekaan, Turki secara resmi menjadikan sekularisme sebagai ideologi negara, dan Mustafa Kemal Attaturk terpilih menjadi Presiden pertama dalam sejarah Republik Turki. Mustafa Kemal ingin Turki melihat negara-negara Barat sebagai model percontohan Republik Modern.

Setelah perang kemerdekaan, tujuan utama Attaturk sebagai pendiri Republik Turki adalah untuk mendirikan negara-bangsa sekuler yang independen berdasarkan pada model Eropa. Runtuhnya kekaisaran memberikan kesan bahwa tidak mungkin untuk mencapai modernisasi yang didalamnya masih ada struktur Islam-Usmani; keberhasilan modernisasi membutuhkan bangunan negara-bangsa yang sekuler (Eligur, 2010)

Dalam visi Mustafa Kemal, nasionalisme untuk menggantikan agama melalui interpretasi radikal Islam dari seorang pandangan nasionalis Turki. Mengikuti Caetani, dia percaya bahwa Islam akan menjadi sebuah (agama dan sistem kepercayaan yang nyata) hanya ketika orang-orang Muslim Arab berbalik untuk menundukkan orang-orang Arab.

Bersamaan dengan indoktrinasi massa, Mustafa Kemal Attaturk berusaha untuk membangun karakter sekuler dari rezim republik, dengan menciptakan negara pertama di dunia muslim yang seperti itu. Konstitusi 1924 yang meniru meniru konstitusi 1921 Polandia,

menyimpan artikel yang menyatakan Islam sebagai agama negara dan mempercayakan pelaksanaan syariat kepada Majelis Agung Nasional Turki.

Namun, ini sedikit lebih dari basa basi yang dimaksudkan untuk meredakan lingkaran koservatif yang benar-benar khawatir; kedua pasal itu dihapus dalam amandemen konstitusi 1928. Secara paralel serangkaian tindakan dilakukan untuk menerapkan sistem sekuler. Pada 1924, Pengadilan Syariat dihapuskan, dan dualisme hukum yang berlaku sejak tahun 1864 berakhir. Pengadopsian hukum sipil Swiss 1912 dan penerimaan hukum kewajiban Swiss 1881 pada tahun 1926, hukum privat sepenuhnya disekulerkan dan mengakhiri banyak praktik Islam seperti poligami.

Amandemen konstitusi tahun 1928 mengganti frasa, "Demi Tuhan (wallahi) dalam sumpah jabatan, dengan frasa "atas penghormatan saya". Pada tahun 1931, Partai Rakyat Republik secara resmi mengadopsi prinsip Republik Prinsip, *laïcité* sebagai salah satu pilar organisasi. pada 1937, prinsip ini diabadikan menjadi konstitusi prinsip sentral Republik Turki (Hanioglu, 2011).

Kebijakan sekularisme juga berdampak kepada praktik keagamaan Islam lainnya, sufisme. Sufisme mempunyai sejarah dan dinamika yang panjang pada era Turki Usmani. Pada september 1925 tempat-tempat suci (*turbes*) dan pusat-pusat perkumpulan dervish (*tekkes*) ditutup dan bulan Nobember turban, dan fez, topi merah yang dahulu dipakai oleh orang Usmani sejak masa Sultan Mahmut II juga dilarang dan digantikan dengan topi yang bergaya barat. langkah ini mendapatkan perlawanan dari penduduk. Tekke dan Turbe memainkan peran penting pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan Muslim dan pemakaian topi dipandang sebagai simbol orang Kristen Eropa. komisi revolusi memainkan peranan mereka dalam merepresi tindakan mereka. Dibawah undang-undang Pemeliharaan Ketertiban, hampir 7500 orang dipenjara dan 660 orang dieksekusi mati (Zurcher, 2017).

Negara secara resmi membubarkan tarekat-tarekat sufi pada 1925, meskipun banyak yang bergerak dibawah tanah. tarekat yang mengandalkan ritual yang mencolok, pakaian khas, bangunan dan upacara khusus, seperti Malawiyah, mengalami banyak kesulitan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan karena visibilitasnya membuat mereka lebih mudah ditemukan dan dikendalikan. Namun Tarekat Naqsyabadiyah selamat dari larangan hukum tahun 1925 dan penganiayaan pada 1930-an karena tidak membutuhkan tekke dan salah satu ritualnya adalah zikir diam yang relatif tidak mencolok. semua tarekat sufi berada dibawah tanah dan mengorganisir kegiatan mereka secara diam-diam sampai tahun 1960-an ketika negara mengurangi kebijakan sekulernya (Ahmet Yukyelen: 2008).

Dalam praktiknya, kebijakan sekularisasi yang dilakukan oleh pemerintah Turki bersifat radikal atau bersifat asertif. Undang-undang Turki yang mengatur tentang sekularisme secara tidak langsung memaksa mengubah Turki menjadi negara yang sekuler. Cara-cara yang dilakukan pemerintahan Turki dalam menerapkan sekularisme bersifat 'top-down' atau kebijakan yang bersifat langsung dari pemerintahan yang diaplikasikan secara langsung kepada masyarakat, sehingga memaksa simbol-simbol, praktik keagamaan dilarang dan ditutup.

Dalam sejarahnya, muncul gerakan-gerakan yang ingin melawan praktik sekularisme Turki. Jika melacak akar-akar gerakan yang melawan tatanan Republik Turki muncul dari kalangan tarekat. Misalnya; pemberontakan Said Nursi yang mempunyai dua motif yaitu; menuntut hak kemerdekaan Kurdi dan ingin memberontak kepada pemerintah pusat Turki yang baru. Said Nursi

sendiri merupakan seorang pengikut Tarekat Naqsyabadiyah dan menjadi seorang guru atau Mursyid.

Dalam konteks modern, munculnya partai-partai yang berhaluan Islamis pada tahun 1970-an hingga 2000-an ada akar dari gerak tarekat atau persaudaraan sufi yang mendukungnya, dalam hal ini, tarekat Naqshabandi. Dimana para anggota, pendukung dari partai-partai Islamis tersebut merupakan seorang murid dari seorang syekh Tarekat Naqshabandi, Syekh Mehmet Zahid Kotku yang mempusatkan gerakannya di masjid Iskenderpasa, yang berpusat di Istanbul.

Dari jamaah Iskenderpasa tersebut lahir orang-orang yang memimpin sebuah partai Islamis bahkan memegang jabatan di pemerintahan pusat, salah satunya adalah Necmettin Erbakan. Darinya dia telah memimpin berbagai partai Islamis seperti: Partai Tatanan Nasional (1969-1971), Partai Keselamatan Nasional (1972-1980) dan Partai Refah (1983-1997). Melalui Partai Refah ini dia berhasil meraih jabatan Perdana Menteri Turki (1996-1997) sebelum ia akhirnya diberhentikan dan partainya dibubarkan (Rabasa & Larabee, 2008).

### *Pemilihan Umum dalam Republik Turki*

Ketika berkuasa Mustafa Kemal menggunakan instrumen partai politik guna untuk melancarkan strategi sekularismenya dengan bernaung di bawah Partai Rakyat Republik (CHP - *Cumhuriyet Halk Partisi*), yang mana partai ini sebelumnya bernama Partai Rakyat (HP - *Halk Partisi*) lalu berubah pada namanya pada 1924. Melalui kebijakan Atatürk, Partai Rakyat Republik menguasai parlemen Turki selama dua puluh tujuh tahun dengan kewenangan Atatürk yang hanya memberlakukan kebijakan satu partai. Kecuali dua partai yang gagal mencoba dalam sistem bipartai—Partai Republik Progresif (*Terakkiperver Cumhuriyet Firkasi*) sejak 1924 sampai 1925 dan Partai Kebebasan Publik (*Serbest Cumhuriyet Firkasi*) pada 1930 (Kuru, 2009).

Setelah kematian Atatürk pada tahun 1938, İsmet İnönü (1884-1973) terpilih menjadi presiden. Setelah Perang Dunia II, Turki memilih menjadi bagian dari "Dunia Bebas" yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Hal itu mendorong İnönü untuk menerima sistem multipartai yang baru. CHP tetap berkuasa dengan memanipulasi pemilihan multipartai pertama pada 1946 dengan "pemungutan suara terbuka dan penghitungan rahasia". Kongres CHP pada tahun berikutnya mengalami perdebatan substansial tentang pendidikan agama. Para peserta menyepakati definisi sekularisme (asertif) sebagai "pemisahan ide-ide keagamaan dari urusan negara dan dunia" dan agama sebagai "urusan hati nurani" (Kuru, 2009).

Kritik internal, selain datang dari partai oposisi baru, Partai Demokrat, membawa pemerintahan CHP untuk merubah beberapa kebijakan, seperti mengizinkan orang untuk pergi haji menggunakan mata uang asing, yang berada di bawah monopoli negara. Pada tahun 1949, pemerintah membuka delapan sekolah Imam-Hatip dalam sepuluh bulan. Pada tahun yang sama İnönü menunjuk Şemsettin Günaltay, seorang politisi CHP dan seorang sarjana dari ilmu fisika dan Islam, sebagai perdana menteri.

Pada masa pemerintahannya, Günaltay membuka departemen Teologi di Universitas Ankara dan memprakasai pelajaran agama di sekolah dasar. CHP tidak terlalu menggubris tuntutan Muslim dengan kebijakan ini karena ideologi sekularisme yang tergas. Pada pemilu 1950, CHP hanya mendapat 39 persen suara, sedangkan Partai Demokrat memimpin dengan perolehan suara 53 persen (Kuru, 2009).

Ada konsensus luas di antara para sejarawan bahwa kemenangan telak Partai Demokrat pada pemilihan Mei 1950 adalah titik balik dalam sejarah politik Turki modern. Karakter mejelis yang baru, di mana Partai Demokrat meraih suara mayoritas (408 kursi dibanding Partai CHP yang hanya 69) dan pemerintahan yang baru sangat berbeda dengan yang lama.

Partai ketiga yang cukup penting, *Millet Partisi* (Partai Bangsa) yang reaksioner memenangkan satu kursi pada pemilu 1950, dan dilarang pada 1953 karena menggunakan agama untuk tujuan politis. Tak lama, partai ini dibentuk lagi dengan naman *Cumhuriyet Millet Partisi* (Partai Bangsa Republik). Pada pemilihan tahun 1954 yang meraih sukses terbatas dengan 4,8 persen suara dan mengirimkan 5 utusan untuk deputi, yang semuanya dari Provinsi Kirsehir, di mana pemimpinnya Osman Bölükbaşı (yang merupakan wakil satu-satunya dari Partai Bangsa sejak 1950 hingga 1954) mendapatkan sambutan yang baik (Zurcher, 2017).

Sepanjang tahun 1950-an, memenangi berbagai pemilihan umum lainnya, dan Adnan Menderes tetap menjadi perdana menteri selama sepuluh tahun. Secara ekonomi, Partai Demokrat menganut sistem liberal, sedangkan CHP tetap mempertahankan statisme. pemerinahan Demokrat berusaha menjauhkan diri dari sekularisme asertif dan melakukan kebijakan tertentu untuk memberikan lebih banyak kebebasan beragama. Pada tahun 1950, kelompok Partai Demokrat memimpin pencabutan larangan azan berbahasa Arab. Kebijakan pro-religius lainnya dari Partai Demokrat seperti mengenakan kembali pelajaran agama di semua sekolah umum; pembukaan sembilan belas sekolah Imam-Hatip, dan penyiaran agama lewat radio publik. Berakibat, kaum Kemalis mengkritik Partai Demokrat karena mendorong *irtica* (Kuru, 2009).

Pada 27 Mei 1960, militer Kemalis melakukan kudeta. Mereka melarang Partai Demokrat dan mengeksekusi Menderes dan dua orang penting di kabinet. Mereka juga mengusir 235 dari 260 jenderal dan 5.000 perwira militer lainnya, serta 147 professor universitas. Beberapa pemimpin junta ingin melakukan Tufkifikasi azan secara paksa. Namun mereka kalah sedikit dalam pemungutan suara tentang hal ini dalam pertemuan junta terbatas. Setahun kemudian Turki kembali ke sistem multipartai. Dalam paruh kedua tahun 1960-an, *Adalet Parti* (Partai Keadilan) dan pimpinannya Suleyman Demirel mewakili warisan Menderes, memiliki dukungan yang luar biasa dari rakyat terhadap akomodasi kebijakan terhadap agama. Selama pemerintahan pertama Demirel beberapa sekolah Imam-Hatip dibuka; jumlah mereka mencapai tujuh puluh satu pada tahun 1969 (Kuru, 2009).

### *Munculnya Partai Berhaluan Islamis di Turki*

Sejak tahun 1970-an partai-partai berhaluan Islamis mulai hadir dalam kontestasi politik Turki. Selama perjalanannya, partai politik berhaluan Islamis mengalami berbagai tantangan. Munculnya partai-partai Islamis pada tahun 1970-an, ini merupakan sebuah aksi yang berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada awal-awal republik Turki berdiri juga muncul tetapi tidak bisa dikatakan berhasil, karena di represi dan di tutup oleh pemerintahan Ataturk.

Partai-partai awal seperti, Partai Kebangkitan Nasional (*MKP-Milli Kalkinma Partisi*) didirikan pada tahun 1945, yang mempunyai agenda-agenda untuk menegaskan nilai-nilai tradisional dalam kebijakan pendidikan. Lalu, Partai Keadilan Sisual (*SAP-Sosyal Adalet Partisi*) didirikan pada 1946 yang berupaya mendukung federasi umat Islam sedunia. Begitupun dengan tiga partai lainnya yang didirikan pada tahun yang sama, yakni Partai Petani dan Peladang (*Cifcti ve Koylu Partisi*) Partai Purifikasi dan Proteksi (*Aritma Koruma Partisi*) dan juga Partai Perlindungan

Islam (*Islam Koruma Partisi*) semua partai tersebut mempunyai orientasi program mempertahankan tradisi-tradisi Islam dan nilai-nilai "nasional".

Partai Koservatif Turki (*Turk Muhafazakar Partisi*) didirikan pada tahun 1947, dan Partai Pertahanan Perkebanunan dan Perusahaan Bebas (*Toprak, Emlak ve Sebest Tesebbus Partisi*), yang didirikan pada 1949, juga memiliki perhatian serupa dalam programnya yaitu memajukan perjuangan Islam.

Tetapi partai keagamaan yang terpenting pada masa ini adalah Partai Bangsa (*Millet Partisi*) yang didirikan pada 1948 oleh sekelompok anggota Partai Demokrat yang diusir dari partai karena melanggar aturan partai. Program Partai Bangsa menekankan kebutuhan untuk pembaruan keagamaan, mementingkan adat istiadat dan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sosial, menghormati institusi-institusi Islam, dan ingin memasukkan bidang studi Islam ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah (Binnaz Toprak: 1995).

Namun, era partai-partai Islam yang menonjol dan menyita perhatian pemerintah Turki adalah pada tahun 1970-an. Ketika beberapa aktivis islamis mendirikan partai Islam, kemudian dibubarkan lalu mendirikan partai lagi dengan nama yang lain. Era ini ditandai dengan hadirnya partai yang berhaluan Islam dan mendapat dukungan dari kelompok tarekat yang mempunyai besar dalam dimensi politik Turki.

Erbakan dan teman-temannya meninggalkan Partai Keadilan sebelum pemilu 1969 dan kemudian mendirikan Partai Tatanan Nasional (MNP - *Milli Nizam Partisi*) pada 26 Januari 1970. Deklarasi pendirian partai mengacu pada zaman keemasan periode Usmani. Anggaran Dasar partai mengidentifikasi peniruan westernisasi dan pembubaran warisan Usmani-Islam sebagai akar penyebab masalah negara dan menawarkan identitas baru dengan menghargai sejarah Islam-Usmani dan teknologi dan industrialisasi sebagai obat. MNP secara sosial dan budaya berakar pada kota Anatolia kecil dan desa mewakili kepentingan provinsi. Lima pendirinya adalah insinyur, lima lainnya adalah pengusaha kecil dan sisianya adalah pengacara dan pekerja kantor.

Pada tanggal 20 Mei 1971, dua bulan setelah kudeta militer, Pengadilan melalui konstitusinya membubarkan MNP, menganggap bahwa partai ingin mengubah prinsip-prinsip negara sekuler dan mencoba melembagakan tatanan islam untuk menggantikan sistem Kemalis. Erbakan, ketua MNP, terpaksa melarikan diri ke Swiss untuk menghindari tuntutan dan tinggal di sana sampai 1972 (Yavuz, 2003).

Para jenderal yang menentang pelarangan MNP dan menentang Dominasi Süleyman Demirel atas spektrum politik meminta beberapa dari Teman-teman Erbakan untuk mendirikan partai baru, Partai Keselamatan Nasional (MSP- *Milli Selamet Partisi*) yang didirikan pada 11 Oktober 1972.

Partai Keselamatan Nasional adalah partai konservatif dengan pengikut marjinal di antara pengusaha provinsi dan pengikut tarekat. Erbakan membawa apa yang dikenal sebagai Gerakan Pandangan Nasional (MGH - *Milli Gorus Harekati*) yang kritis terhadap program westernisasi Turki. MGH mengusulkan sebuah 'tatanan nasional' alternatif dan seolah-olah lebih otentik yang menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional (yaitu, Islam) dan institusi Usmani, meskipun ditentukan secara ambigu. Mengajukan integrasi ekonomi dengan dunia Islam untuk menyeimbangkan kekuatan Barat. Sikap ini tidak berarti penolakan terhadap teknologi atau industri (Yavuz, 2003).

Lebih radikal dari pendahulunya, MSP mengorganisir demonstrasi yang menterang sistem sekularisme dan bahkan Atatürk, dan menyerukan restorasi *seriat* (hukum Islam). Namun, partai tersebut tidak berhasil dalam pemilihan pada 1970-an, menunjukkan bahwa agama merupakan faktor yang tidak cukup untuk memobilisasi dukungan politik (White, 2008).

Pada tahun 1970an, Partai Keselamatan Nasional membuktikan dirinya sebagai aktor penting dalam perpolitikan Turki. Dengan meraih posisi ketiga pada pemilihan tahun 1973, dengan meraih 12 persen suara dan mendapatkan 11 persen jatah kursi di parlemen. Erbakan membangun koalisi pemerintahan dengan Partai Rakyat Republik, dan menjadi wakil perdana menteri di bawah pemerintahan Bulent Ecevit. Setelah koalisi tumbang, Partai Keselamatan Nasional bergabung dengan pemerintahan Front Nasional yang dipimpin oleh Suleyman Demirel pada 1975 dan 1977 (Eligur, 2010).

Pada 6 September 1980, Partai Keselamatan Nasional mengorganisir sebuah apel Islamus anti-sekuler "*Saving Jerusalem*" di kota Konya, dimana para pendukung partai secara terbuka menyerukan untuk penghancuran negara sekuler Turki. Demonstran juga memprotes keputusan Israel untuk menyatakan Jerusalem sebagai ibukota negaranya. Selama berdemo, para demonstran berbaris dan mengenakan jubah panjang, memakai *fez* dan mengibarkan bendera hijau, menyerukan restorasi tatanan syariah di Turki dengan meneriakkan "syariah akan datang, kebrutalan akan berakhir", "kedaulatan milik Allah", "kita bersiap untuk berjihad", "al-Quran adalah konstitusi", "sekularisme adalah ateisme", "kita menginginkan sebuah ke tak-terbatasan", tanpa kelas, negara Islam", dan "syariah atau mati". Kaum Islamis menolak menyanyikan lagu kebangsaan, lebih memilih menyatakan "syariah adalah *hak*, [perintah Tuhan: perintah yang adil]; seorang kafir adalah pengkhianat", dan kita menginginkan panggilan untuk sholat (*ezan*); kita tidak ingin menyanyikan lagu ini (Eligur, 2010)

Setelah kudeta militer tahun 1980, Partai Keselamatan Nasional ditutup, dan Erbakan dan para letnannya dilarang melakukan kegiatan politik selama sepuluh tahun. Namun, partai itu muncul kembali pada tahun 1983 dengan nama baru— Partai Kesejahteraan (*Refah Partisi*— RP). Ideologi partai ini sedikit berbeda dari Partai Keselamatan Nasional.

Ini mengungkapkan permusuhan yang sama terhadap Westernisasi dan bias anti-Barat yang sama. Program ekonominya "Orde Adil", menekankan perlunya keadilan dan kesetaraan sosial yang lebih besar dan diakhirinya pengaruh Barat yang tidak semestinya. Dalam kebijakan luar negeri, Partai Refah menganjurkan memangkas hubungan Turki dengan Barat dan integrasi yang lebih erat dengan dunia Muslim (Angel Rabasa dan F. Stephen Larabee, 2008).

Pada pemilu 1987, Partai Refah gagal memperoleh 10 persen suara dan dengan demikian tidak dapat mewakili di parlemen. Namun, sepanjang tahun 1980-an Partai Refah pendukungnya meningkat, termasuk anggota komunitas bisnis dan profesional Islam yang berkembang yang melakukan bisnis secara eksplisit dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Mereka menyediakan landasan ekonomi yang stabil untuk berbagai aspek dari munculnya gerakan Islamis, baik dalam bentuk kontribusi kepada partai politik, dukungan untuk organisasi amal, beasiswa atau pembangunan sekolah dan asrama yang dipisahkan berdasarkan gender politik (White, 2008)

Dalam pemilihan kotamadya nasional yang diadakan pada tahun 1994, Partai Refah menggandakan suaranya dari pemilu 1989, memenangkan dua puluh delapan dari tujuh puluh enam kursi walikota di ibu kota provinsi, termasuk enam dari lima belas kota terbesar di Turki. Istanbul

dan Ankara keduanya memilih walikota Islam. Hasil pemilu mengejutkan Kemalis, yang mengorganisir untuk melawan ancaman fundamentalis .

Pada pemilu nasional 1995, Partai Refah menempati urutan pertama dengan mendapatkan 21,6% suara dan membentuk koalisi dengan Partai Jalan Sejati (DYP- *Dogru Yol Partisi*) yang beraliran tengah-kanan (penerus Partai Keadilannya Suleyman Demirel), dengan Erbakan sebagai perdana menteri. Kemengan Partai Refah sangat mengejutkan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh tatanan sekularisme, terutama militer. Untuk pertama kalinya sejak Republik Turki didirikan pada tahun 1923, Turki dipimpin oleh sebuah partai Islam, dengan seorang perdana menteri seorang Islamis (Rabasa & Larabee, 2008).

Sebagai perdana menteri, Erbakan mencoba menerapkan beberapa gagasannya tentang reorientasi Turki terhadap dunia Muslim. Pada pertemuan dengan para diplomat, dia memuji revolusi Iran. Pada Februari 1996, dia makan malam bersama Louis Farrakhan, pemimpin *American Nation of Islam* yang sedang mengunjungi negara-negara Muslim. Namun, upaya Erbakan tidak banyak berhasil. Kontrol Turki atas sungai Tigris dan Efrat melalui Anatolia Tenggara melalui proyek besar dengan lebih dari dua puluh bendungan telah membuat hubungan tegang dengan hilir negara Irak dan Suriah. Pada kunjungan kenegaraan Erbakan ke Libya, pemimpinnya, Muamar al-Qaddafi, mengkritik Turki di hadapan pers Libya atas perlakuannya kepada orang-orang Kurdi (Kuru, 2009).

Langkah-langkah ini, bersama dengan retorika Erbakan yang sering kali berlebihan mengkhawatirkan tatanan sekuler, khususnya militer. Namun, daripada campur tangan secara langsung, seperti yang terjadi pada tahun 1960, 1971, dan 1980, militer menggunakan metode yang lebih halus dan tidak langsung untuk mengusir paksa Erbakan. Pada tanggal 28 Februari 1997, Dewan Keamanan Nasional— yang didominasi militer— memberikan daftar rekomendasi kegiatan anti sekularisme kepada Erbakan. Ketika Erbakan menolak keras melaksanakan rekomendasi tersebut, militer mengadakan serangkaian instruksi dan memobilisasi untuk penegakan sekularisme melawan dia, akhirnya memaksanya untuk mengundurkan diri pada Juni 1997 dalam peristiwa yang disebut sebagai kudeta "diam" atau "pasca modern". Pada Januari 1998, Partai Refah dibubarkan, dan Erbakan dan para letnan dilarang terjun ke dalam aktivitas politik selama lima tahun (White, 2008).

Pada saat yang sama, kudeta 28 Februari memiliki dampak yang penting pada orientasi dan perkembangan gerakan Islam. Ini mempertegas fakta bahwa sebenarnya, upaya langsung untuk mendorong agenda Islam secara terbuka tidak berhasil dan akan menghasilkan oposisi yang kuat dari kaum sekularis, terutama militer. Banyak anggota Gerakan Islamis menyimpulkan bahwa satu-satunya cara kaum Islamis berhasil adalah dengan menghindari konfrontasi dengan kaum sekularis dan mengabaikan agenda keagamaan.

Hal ini memicu perdebatan intens dan pemikiran ulang tentang agenda dan gerakan dalam gerakan Islam strategi di masa depan, dan sebuah perkembangan filosofis dan politik yang retak yang memunculkan dua kubu yang berbeda. Kaum tradisional (*gelenekciler*), Erbakan sebagai pusatnya dan kepala letnannya, Recai Kutan, yang menentang serius terhadap setiap perubahan dalam pendekatan atau kebijakan, sementara kelompok muda "modernis" atau "reformis" (*yenilikciler*), di pimpin oleh Recep Tayyip Erdogan, walikota Istanbul dan rekan dekatnya Abdullah Gul, berpendapat bahwa partai perlu memikirkan kembali pendekatannya terhadap sejumlah persoalan mendasar, khususnya demokrasi, hak kemanusiaan, hubungan dengan Barat. Kaum

reformis juga menantang gaya kepemimpinan Erbakan yang otoriter dan menyerukan peran partai yang lebih besar dalam demokrasi

Perdebatan internal ini tercermin dalam platform Partai Kebajikan (*Fazilet Partisi* (FP)) yang menggantikan Partai Kesejahteraan. Namun, sementara Partai Kebajikan adalah penerus Partai Kesejahteraan, yang berbeda dalam sejumlah hal penting. Tidak seperti Partai Kesejahteraan, yang secara ideologis memusuhi Barat dan Westernisasi, Partai Kebajikan mulai merangkul nilai-nilai politik Barat. Singkatnya, anti-Barat dan kecurigaan terhadap barat tidak lagi menjadi ciri khas wacana Islamis.

Setelah Partai Kebajikan ditutup oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Juni 2001, gerakan tersebut secara resmi terpecah. Kaum tradisionalis mendirikan Partai Kebahagiaan (*Saadet Partisi* (SP)) di bawah kepemimpinan formal Recai Kutan, dengan Erbakan yang sesungguhnya memimpin di balik layar. Kaum modernis mendirikan partai baru, AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan), dengan Erdogan sebagai pemimpin partai.

Para pendiri AKP, sebaliknya, terbuka untuk kerjasama dengan tatanan sekuler. Program AKP menekankan pada kesetiaan partai pada nilai-nilai dasar dan konstitusi Republik Turki. Sementara AKP memiliki akar Islam—banyak pemimpinnya termasuk Erdogan dan Gül, keluar dari gerakan *Milli Görüş* dan pernah menjadi anggota Partai Kesejahteraan dan Kebajikan—AKP mendefinisikan dirinya bukan sebagai partai Islam tetapi sebagai partai demokrat-konservatif yang mirip dengan partai demokrasi Kristen di Eropa Barat.

Ini adalah pergeseran ideologis yang penting. Identitas politik Islam secara tradisional dibangun di atas oposisi terhadap Barat, yang dianggap sebagai entitas yang harus ditolak atau dilawan. Namun, sejak didirikan pada tahun 2001, AKP semakin menekankan nilai-nilai politik Barat seperti demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum dalam wacana publiknya. Pada saat yang sama, partai datang untuk menengok Barat, khususnya Uni Eropa, sebagai sekutu penting dalam perjuangannya melawan batasan negara Kemalis. Sedangkan Islamis di Turki pada masa lalu menganggap seruan Barat untuk reformasi demokrasi yang lebih besar sebagai upaya untuk memaksakan nilai-nilai asing pada masyarakat Turki, AKP melihat agenda Barat semakin tumpang tindih dengan agendanya sendiri. Partai melihat keanggotaan di Uni Eropa sebagai sarana untuk mengurangi pengaruh militer dan membangun kerangka politik yang akan memperluas toleransi agama dan memastikan kelangsungan hidup politiknya sendiri (Rabasa & Larabee, 2008).

### *Jaringan dan Mobilisasi Sosial Kaum Tarekat*

Tarekat Naqsyabandiyah dalam berbagai manifestasinya telah menjadi bagian dari sejarah, budaya, ekonomi, dan identitas individu Turki selama beberapa abad. Seperti tarekat sufi lainnya, tarekat ini memiliki pengalaman transformasi internal dan kebangkitan dalam beberapa dekade terakhir, terlepas dari sekularisasi dan represi yang dipaksakan oleh negara. Tidak mengherankan, kebangkitan ini berhubungan dengan liberalisasi dan integrasi negara Turki ke pasar global. Jaringan agama, sosial, dan budaya Naqsyabandiyah meliputi asosiasi politik dan ekonomi. Reaksi terhadap penindasan, sebagian besar dari tarekat ini secara bertahap mengubah diri mereka dari asosiasi keagamaan yang ketat menuju persaingan pendidikan informal dan asosiasi budaya dengan dasar-dasar agama. Mereka menjadi bagian dari masyarakat tradisional yang menganggap jenis sekularisasi Kemalis yang terlalu radikal dan destruktif dengan menghormati sejarah dan tradisi

Turki. Tarekat Naqsyabandiyah menyediakan struktur dan berfungsi sebagai katalis untuk mempertahankan pendidikan moral agama dan pengembangan spiritual umat Islam masyarakat Turki.

Dalam beberapa dekade terakhir, tarekat Naqsyabandiyah memobilisasi pada tingkatan internal karena kekhawatiran duniawi yang semakin meningkat. Untuk sampai batas tertentu, tarekat tersebut menjadi sekular, dan pandangan religiusnya, pada gilirannya, telah dimodifikasi oleh kepentingan yang lebih profan. Contoh dekat dari tarekat Naqsyabandiyah, dan khususnya cabang Khalidiyah, dapat memberikan wawasan tentang Islamisme Turki karena tiga alasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakan Yavuz. Pertama, Naqsyabandiyah sejauh ini paling aktif secara politik dan mewakili model untuk hampir semua gerakan politik Islam kontemporer di Turki pada generasi berikutnya.

Kedua, tarekat juga merupakan cara yang paling mudah untuk memahami interaksi sosial antara politik dan agama di negara ini. Terakhir, Tarekat Naqsyabandiyah memainkan peran formatif dalam evolusi identitas Islam di Turki dengan mengembangkan tiga pola interaksi dengan negara: konfrontasi, penarikan dan keikutsertaan (Yavuz, 2003).

Jeda antara tahun 1920-an dan 1930-an juga ditandai dengan fenomena luar biasa yang muncul dari luar ibu kota, yang juga berasal dari Naqsyabandiyah: Bediuzzaman Said Nursi (1876-1960) yang dididik di pondokan Naqsyabandiyah-Khalidiyah di Turki Timur, wilayah Hizan di Anatolia. Serif Mardin mengatakan bahwa ini Bediuzzaman Said Nursi sebagai mobilisasi 'pinggiran' karena mereplikasi gerakan pinggir Islam lainnya pada waktu itu, yang tampaknya menjadi dimensi penting dari revitalisasi Islam pada abad kesembilan belas dan kedua puluh (Mardin, 1991).

Kelompok Nurcu telah berkembang menjadi komunitas sosial politik yang efektif dan kuat di Turki kontemporer. Tulisan-tulisan Said Nursi, khususnya magnum opusnya, *Risale-i Nur Külliyyatı*, merupakan dasar dari gerakan kepercayaan ini. Karya Nursi menandai wacana politik Islam yang tak terhapuskan, menawarkan ide-ide orisinal untuk mengatasi masalah politik dan sosial budaya. Dinamika kelompok Nur sebagai gerakan sosial berakar pada jaringan media, pendidik, bisnis dan perusahaan penerbitan.

Sistem multipartai memfasilitasi "kembalinya" Nursi ke politik. Dia melihat "partai politik sebagai pilar demokrasi." Dalam tulisan-tulisan awalnya, ia berpendapat bahwa partai politik kompatibel dengan Islam selama mereka mempromosikan persatuan dan kesejahteraan bangsa. Ia mendukung penuh sistem multipartai dan tidak segan-segan mendukung Partai Demokrat melawan Partai Rakyat Republik yang berkuasa selama tahun 1950-an. Dia berpendapat bahwa konstitusionalisme parlementer dan supremasi hukum menyediakan lingkungan terbaik untuk peremajaan Islam. Nursi melihat partisipasi politik (*mesveret*) dan supremasi hukum sebagai dua pilar sosial keadilan. Dia membela parlementarisme dan konstitusionalisme sebagai sarana yang paling masuk akal bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan adil (Yavuz, 2003).

Partai Demokrat menjalin aliansi dengan persaudaraan Islam/ tarekat, terutama dengan Nurcu dan Naqsyabandiyah, sebagai imbalan atas dukungan elektoral mereka. Hal ini menyebabkan kebangkitan persaudaraan Islam/tarekat, peningkatan mereka pada politik dan pelanggaran kebijakan Partai Demokrat terhadap sekularisme. Misalnya setelah dua puluh tiga tahun kehidupan

politik, pemimpin Nurcu Said Nursi memperbarui minatnya dalam politik dengan bekuananya Partai Demokrat (Banu Eligur, 2010).

Naqsyabandiyah merupakan akar dari Islam politik di Turki. Partai Islamis Turki pertama, Partai Tatanan Nasional-nya Erbakan (MNP- *Milli Nizam Partisi*) dan Partai Keselamatan Nasional (MSP - *Milli Selamet Partisi*) didirikan melalui promosi dan dukungan dari Syekh Mehmet Zahid Kotku, guru Tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah yang berpusat di masjid Iskenderpasa, Istanbul.

Setelah pertemuan mereka dengan Kotku, Necmettin Erbakan, bersama teman-temannya: Ahmet Tavfik Paksu, Hasan Aksay, dan Mustafa Yazgan bertemu untuk memutuskan nama partai. Meskipun, nama itu berasal dari penulis Islamis berpengaruh, Esref Edip, yang mengatakan bahwa ia bermimpi di mana sebuah suara memberitahunya tentang nama dan lambang partai. Dengan demikian, mereka menyepakati nama Partai Tatanan Nasional (MNP-*Milli Nizam Partisi*) dengan lambang tangan menunjuk ke surga dalam Islam tata krama. Aspek penting lainnya dari peristiwa ini adalah koalisi Pengikut Naksibendi dan Nurcu terlibat dalam pembentukan MNP. Anggota pendiri partai ini termasuk tokoh-tokoh kunci dari tarekat Naqsyabandiyah dan gerakan Nurcu, seperti Erbakan (anggota parlemen dari Konya dan anggota Naqsyabandiyah), Ahmet Paksu (anggota parlemen dan pengikut Nurcu, dan Aksay (mantan anggota DPR dan pengikut Naqsyabandiyah). Individu-individu ini memainkan peran penting dalam politik Islam selama tahun-tahun berikutnya. Ketua pertama MNP, Suleyman Arif Emre; Erbakan menggantikannya pada 8 Februari 1970 (Yesilada, 2002).

### *Figur Sentral: Mehmet Zahit Kotku*

Penting untuk mengkaji peran Kotku sebagai syekh Sufi dalam transformasi tarekat Naqsyabandiyah dan perkembangannya sebagai model matriks mayoritas gerakan sosial politik Muslim Turki kontemporer. Ketika Kotku bertugas di tentara Usmani, selama fragmentasi kerajaan, dia terlibat dalam mendiskusikan solusi dengan pengikut tarekat Naqsyabandiyah lainnya. Pada usia 21 tahun ia membangun ikatan spiritual dengan Syekh Dagistani, Omer Ziyauddin. Dia bekerja sebagai imam resmi di masjid yang berbeda dan memimpin tarekat pada tahun 1952. Banyak tarekat berbeda sufi di Turki modern, termasuk tarekat Naqsyabandiyah, yang mengklaim Kotku sebagai *Qutb*, "kutub" atau "poros spiritual", gerakan mereka sejak 1960-an dan 1970-an. Salah satu alasan mengapa Kotku muncul sebagai sufi yang paling signifikan setelah 1952 ada hubungannya dengan orang-orang yang disekitarnya; Turgut dan Korkut Ozal, Cevat Ayhan, Temel Karamollaoglu, Teoman Riza Guneri, Hilmi Guler, Nazif Gurdogan, Recep Tayyib Erdogan, dan banyak tokoh publik lainnya yang akan menjadi tokoh terkemuka dalam kehidupan sosial dan politik Turkim termasuk menteri (Korkut Ozal, Lutuf Dogan, Fehim Adak) seorang perdana menteri dan presiden (Turgut Ozal) perdana menteri lainnya (Erbakan) (Yavuz, 2003).

Kotku mendorong dan berkontribusi secara finansial untuk dua perkembangan yang luar biasa. Pertama, dia meyakinkan Erbakan bahwa dia harus mendirikan industri pabrik dengan model Islam, dan ini mengarahkan pada pembangunan pabrik yang membuat pompa irigasi. Kedua, pada 1968 ia mempengaruhi dalam pendirian *Sabah*, sebuah koran harian yang mengangkat tema-tema keislaman. Kepekaannya yang luar biasa terhadap modernitas menonjol ketika memilih seseorang menjadi menantu yang menjadi Profesor di Fakultas Teologi Ankara, Esat Cosan, yang juga merupakan penerusnya dalam tarekat tersebut. Profesor Cosan mengepalai sebuah organisasi yang menerbitkan tiga majalah berkala yang berideologi Islam, salah satunya berjudul *Ilm ve Sanat*

(ilmu Pengetahuan dan Seni) menjadi bacaan yang bermanfaat sebagai majalah informatif bila dibandingkan rekan-rekannya yang sekuler (Mardin, 1991).

Selama pemilu 1973 Erbakan berkampanye di seluruh Turki. Upayanya itu terbayarkan ketika Partai Keselamatan Nasional menerima 11,8 persen suara. Dengan keberhasilan ini muncul pemerintahan koalisi dengan partai Bulent Ecevit, Partai Rakyat Republik (CHP- *Cumhuriyet Halk Partisi*). Namun, koalisi tersebut menyebabkan perpecahan internal antara Naqsyabandiyah dan Nurcu di Partai Keselamatan Nasional. Kelompok Nurcu menentang MSP dan mulai meninggalkan koalisi partai. Terlepas dari kritik keras dari Nurcu dan beberapa sayap kanan Islamis lainnya, Erbakan dan timnya bertindak rasional dalam membentuk koalisi pemerintahan, dengan partai politik kiri tengah, dan kemudian kanan tengah.

Partai Keselamatan Nasional berhasil masuk ke publik birokrasi dan menempatkan pendukungnya di posisi kunci kementerian penting seperti kementerian dalam negeri dan kementerian pendidikan. Selama ini, elit Naqsyabandiyah dan Nurcu berada dalam persaingan serius untuk mengontrol Dewan Administrasi Pusat (CAB - Central Administrative Board) dari partai. Setelah kongres nasional ketiga partai, anggota Naqsyabandi, yang didukung oleh Kotku, muncul sebagai pemenang, dan kelompok Nurcu meninggalkan Partai Keselamatan Nasional. Paksu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri Ketenagakerjaan dan anggota Dewan Administrasi Pusat. Dalam dua bulan pengunduran dirinya, 16 anggota parlemen Nurcu juga mengundurkan diri dari partai. Pada pemilihan nasional 1997, pengikut Nurcu memberikan dukungannya kepada partainya Demirel, Partai Kedilan (AP- *Adalet Partisi*) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP - *Milliyetci Hereket Partisi*). Hal ini mengakitbatkan hilangnya banyak suara untuk Partai Keselamatan Nasioanal, dan sejak saat itu Partai Keselamatan Nasional mendapat dukungan dari Naqsyabandiyah dan pengikutnya. Tarekat kecil lainnya memang mendukung Erbakan, tetapi jumlah mereka tidak berkembang (Yesilada, 2002)

### *Basis Dukungan Partai Islamis: Iskenderpaşa Cemaati*

Komunitas Iskenderpaşa (İskenderpaşa Cemaati) adalah sebuah grup yang berafiliasi dengan cabang Khalidi dari Naqsyabandiyah. Cabang Khalidi secara historis berpengaruh di Turki Timur, Irak, Suriah, dan di wilayah yang dihuni Kurdi bagian dari Iran. Cabang Khalidi mencapai puncak pengaruhnya pada abad kesembilan belas, setelah berhasil merekrut anggota bahkan kalangan elit Utsmaniyah (Bacik, 2020).

Syekh Mehmed Zahit Kotku dari cabang Khalidiyah membentuk jamaah Iskenderpaşa. Pengaruh kebangkitannya sejajar dengan Bediuzzaman Said Nursi (1876-1960) yang mendirikan Gerakan Nursi (Nurculuk). Syekh Kotku melatih murid-muridnya agar berpengaruh dalam politik dan media untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman di masyarakat (Yesilada, 2002).

Kotku terkenal pertama kali dirinya sebagai pengkhotbah di Istanbul pada 1950-an. Kegiatan keagamaanya di sekitar masjid Iskenderpaşa secara bertahap membangun identitas kelompok baru. Pada tahun 1952, ketika Abdulaziz Bekkine (pemimpin kelompok) meninggal, Kotku menjadi pemimpin baru. Sebagai seorang yang sosok karismatik, Kotku mengembangkan jaringan yang kuat dengan masyarakat perkotaan dan kelas menengah. Lambat laun, Iskenderpaşa menjadi populer di kalangan kaum urban baru yang berpendidikan Muslim, serta perwakilan Muslim kelas menengah (Bacik, 2020).

Kotku mengubah struktur komunitas berbasis masjid menjadi sebuah gerakan politik. Masjid dalam hal ini Iskenderpasa Camii, bukan lagi tempat untuk jamaah masjid untuk duduk dan berdoa. Ini menjadi pusat bagi pembentukan orang-orang muda, dan banyak dari murid-muridnya, sebagaimana dicatat, menduduki posisi penting di tingkat yang lebih tinggi dalam birokrasi. Namun, Kotku tidak melihat politik sebagai satu-satunya jalan yang tersedia untuk membentuk Turki sebagaimana yang ia cita-citakan. Iskenderpasa mempromosikan sirkulasi ide dan pengembangan intelektual baru di masyarakat dengan menerbitkan di majalah dan siaran mereka di stasiun radionya dan, dengan melakukan itu, memasarkan intelektual dan perwakilannya sendiri.

Iskenderpasa menawarkan studi kasus orientasi tentang gerakan Islam dan model pembangunan identitas horizontal Islam. Secara khusus, Hakan Yavuz berpendapat bahwa keterlibatan Iskenderpasa dalam segmen sosial ekonomi masyarakat yang sifatnya tidak rerlalu religius—seperti media massa, pendidikan, bisnis—sambil terus menekankan yang utama tujuan keagamaan untuk mempromosikan kesalehan individu merupakan model yang penting bagi masa depan Islam dan hidup berdampingan secara damai dengan budaya Barat. Dalam hubungan dengan negara dan politik Turki modern, tarekat tersebut menekankan secara bertahap, program akomodasi dan memusatkan upayanya pada masyarakat sipil. Dalam memperluas ekonomi swasta, tarekat Naqsyabandi Iskenderpasa telah berubah dari gerakan Islam yang berorientasi pada negara menjadi gerakan yang berorientasi pada masyarakat.

Jamaah lain yang juga mempunyai pengaruh, antara lain; Menzil, Ismail Aga, Kibrisi, Erenkoy dan Carsamba. Dengan pengecualian Menzil, yang mendukung Partai Persatuan Raya (BBP- *Buyuk Birlik Partisi*) beberapa jamaah dominan mendukung Partai Refah atau Partai Kebajikan. Menzil merupakan jamaah terbesar yang bergerak di timur Turki. Diperkirakan mempunyai pengikut sekitar 1.5 juta orang (Yavuz, 2003).

Di antara yang disebutkan di atas, jamaah Ismail Aga merupakan salah satu yang paling radikal dalam pandangan Islamisnya. Pengikutnya di Istanbul berjumlah 500,000 dan ada yang mempercayai lebih dari 500,000 yang tersebar di seluruh negara. Perlu melihat sekilas orang-orang yang tinggal di Carsamba dan lingkungan Fatih di Istanbul, di mana penduduknya berpakaian menyerupai yang ada di Teheran, untuk menyadari berapa radikalnya jamaah ini. Jamaah ini dipimpin oleh Syekh Mahmut Hoca (Yesilada, 2002).

## Simpulan

Akar-akar Islamisme dan kebangkitan Islam politik tidak bisa dilepaskan dari faktor tarekat dalam hal ini Naqsyabandiyah. Salah satu cabang Naqsyabandi yang mempunyai andil besar dalam bangkitnya Islamisme Turki adalah Khalidiyah, Naqsyabandi-Khalidiyah. Dari cabang ini lahir jamaah Masjid Iskenderpasa yang dipimpin oleh Mehmet Zahid Kotku. Di tangan Kotku inilah lahir para aktivis-aktivis Islamis yang berhasil mendirikan partai-partai Islam bahkan beberapa birokrat ternama di Turki.

Lahirnya beberapa partai-partai Islam di Turki pada tahun 1970-an hingga 2000-an tidak lepas dari pengaruh Kotku dan jamaah Iskenderpasa. Atas restu Kotku, Necmettin Erbakan berhasil mendirikan berbagai partai-partai Islam, diawali dengan Partai Tatanan Nasional, berlanjut Partai Keselamatan Nasional, lalu Partai Refah, Partai Kebajikan. Semua dari partai-partai tersebut mempunyai nasib yang sama, yaitu dibubarkan oleh pemerintah Turki karena mengusung nilai-nilai Islam dan mencoba untuk menghilangkan sekularisme, yang merupakan fondasi negara Turki.

Presiden Turki sekarang, Recep Tayyib Erdogan yang berasal dari Partai AKP— juga mempunyai akar Islamis yang kuat, Erdogan sendiri merupakan jamaah dan murid Zahit Kotku. AKP sendiri merupakan pecahan dari Partai Kebajikan, namun dalam manifestasinya AKP tidak mencirikan sebagai partai Islam, tetapi mencirikan sebagai konservatif- demokrat.

### Daftar Pustaka

- Bacik, G. (2020). *Islam and Muslim Resistance to Modernity in Turkey*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Bagir, H. (2019). *Mengenal Tasawuf*. Bandung: Mizan.
- Eligur, B. (2010). *The Mobilization of Political Islam in Turkey*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hanioglu, M. S. (2011). *Ataturk: An Intellectual Biography*. Princeton: Princeton University Press.
- Junaidi, A. (2016). Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* , 142-200.
- Kuru, A. T. (2009). *Secularism and State Policies toward Religion The United States, France, and Turkey*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Mardin, S. (1991). The Naksibendi Order In Turkish History. dalam R. Tapper, *Islam in Modern Turkey Religion, Politics and Literature in a Secular State*. London: IB Tauris.
- Ocak, A. Y. (2009). Social, cultural and intellectual life, 1071–1453. In K. Fleet (ed.), *The Cambridge History of Turkey Vol. 1 Byzantium to Turkey, 1071–1453*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rabasa, A., & Larabee, F. S. (2008). *The Rise of Political Islam in Turkey*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Toprak, B. (1999). *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- White, J. B. (2008). Islam and politics in contemporary Turkey. dalam R. Kasaba (ed.) , *The Cambridge History of Turkey Vol. 4 Turkey in the Modern World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yavuz, M. H. (2003). *Islamic Political Identity in Turkey*. Oxford: Oxford University Press.
- Yesilada, B. A. (2002). The Virtue Party. dalam B. Rubin, & M. Heper (ed.) , *Political Parties in Turkey*. London: FRANK CASS AND COMPANY LIMITED.

Yukyelen, A. (2008). Sufism and Islamic groups in contemporary Turkey. dalam R. Kasaba (ed.) , *The Cambridge History of Turkey Vol 4, Turkey in the Modern World*. Cambridge: Cambridge University Press.

Zaid, F. M. (2017). *Tuntas Memahami Makrifat*. Jakarta: Qalam.

Zurcher, E. J. (2017). *Turkey: A Modern History*. London: IB Tauris.